

ABSTRAK

Meningkatnya daya konsumsi masyarakat terhadap kendaraan sebagai kebutuhan primer, memaksa para pihak yaitu pembeli dan penjual mengadakan interaksi yang pada akhirnya melahirkan suatu hubungan hukum yaitu jual beli. Sering kali dalam pelaksanaannya jual beli memiliki konsekuensi adanya sengketa. Sengketa keperdataan di Indonesia merupakan suatu sengketa hukum yang lebih dominan dimasyakatkan yang semakin meningkat di tiap tahunnya khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. Jual beli kendaraan bermotor mengandung resiko adanya peralihan hak milik. Oleh karena itu jual beli yang beresiko tinggi sebaiknya dituangkan secara tertulis agar apa yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli dapat dipahami dengan jelas dan rinci oleh para pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.41/Pdt/G/2021 atas gugatan perbuatan melawan hukum merupakan salah satunya. Putusan tersebut memiliki sengketa atas hak kepemilikan kendaraan bermotor roda dua. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah pertama, bagaimana status kepemilikan terhadap kendaraan sepeda motor tersebut? Kedua, apakah Tergugat dalam perkara No. 41/Pdt.G/2021 PN Kds telah melakukan perbuatan melawan hukum?. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka serta menarik analisis secara deskriptif.

Kata Kunci: *Jual beli, Perjanjian, Hak Milik*

ABSTRACT

The increase in people's consumption power for vehicles as a primary need, forces the parties, namely buyers and sellers, to carry out interactions which in turn give birth to a legal relationship, namely buying and selling. Often the implementation of buying and selling has the consequence of difficulties. Civil disputes in Indonesia are legal disputes that are more dominant in society which are increasing every year, especially in the Kudus Regency area. Buying and selling motorized vehicles carries the risk of ownership rights. Therefore, high-risk buying and selling should be stated in writing so that what has been agreed in the sale and purchase agreement can be understood clearly and in detail by the parties.

The decision of the Kudus District Court No.41/Pdt/G/2021 for a lawsuit against the law is one of them. The ruling has a dispute over the ownership rights of the two-wheeled vehicle. The problems in writing this thesis are first, what is the ownership status of the motorbike? Second, is the Defendant in case No. 41/Pdt.G/2021 PN Kds has committed an unlawful act?. The approach used is a normative juridical approach by taking a statutory approach, case approach, concept approach. This study uses secondary sources of legal material with legal material collection techniques through literature study and descriptive analysis.

Keywords: *Buying and selling, Agreement, Property Rights*